

Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Pengembangan Komunitas

Mudiyono*

Abstract

Given the lucrative nature of palm plantation business Indonesian government has been highly supportive to its expansion. Nucleus Estates and Smallholders Development Scheme was set out on the name of empowering local farmers. This article reviews the extent community empowerment succesful in achieving that objective.

Kata-kata kunci:

kelapa sawit; petani; pengembangan masyarakat.

Tradisi pengusahaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar yang telah dirintis oleh pemerintah kolonial Belanda dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Lebih dari itu, sejumlah pemerintah daerah terutama di Sumatera dan Kalimantan sangat antusias mendorong pengembangannya. Pemasaran komoditi kelapa sawit telah memberikan andil dalam pengembangan devisa untuk pemasukan pendapatan negara. Pertanyaannya, apakah aktivitas ekonomi ini menguntungkan petani kelapa sawit itu sendiri?

Antusiasme dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ditandai dengan perluasan areal perkebunan, termasuk melalui konversi kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan. Proses konversi lahan dan masuknya kegiatan ekonomi dalam skala besar ini tidak

* **Mudiyono** adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Sosiatri, Fisipol UGM, Yogyakarta

selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat lokal. Di berbagai daerah proses ini justru menimbulkan konflik yang diikuti dengan insiden kekerasan dalam bentuk pembakaran, kalau bukan pemusnahan sejumlah kebun kelapa sawit itu sendiri. Reaksi masyarakat ini menimbulkan pertanyaan penting. Mengapa usaha yang dikatakan dilakukan untuk meningkatkan masyarakat justru ditolak oleh masyarakat itu sendiri. Tentulah ada persoalan serius dibalik kemarahan masyarakat ini.

Kita perlu lebih seksama memahami kehidupan petani kelapa sawit. Jangan-jangan, skema perkebunan berskala besar itu bukannya mengembangkan masyarakat melainkan justru membatasi ruang gerak penduduk. Tidak jarang, pembudidayaan kelapa sawit dilakukan di kawasan dimana masyarakat setempat menekuni perladangan, berburu dan meramu hasil hutan. Tanaman kelapa sawit, bagi penduduk setempat merupakan hal baru sama sekali. Mereka belum mengetahui cara-cara pembudidayaannya dan belum juga mengetahuai manfaatnya bagi ekonomi rumah tangga.

Perkebunan kelapa sawit ini pada dasarnya adalah modern berbasis modal besar yang mengandalkan teknologi relatif maju, sawit hadir berhadapan-hadapan dengan sektor tradisional. Pengembangan perkebunan dalam skala besar di tengah-tengah masyarakat peladang bisa dibaca sebagai penciptaan dualisme ekonomi sebagaimana telah dijelaskan oleh Boeke (1953). Proses pembangunan yang dilangsungkan pada dasarnya mengekspos masyarakat tradisional terhadap kekuatan ekonomi berbasis modernitas. Sektor modern yang beroperasi dengan skema Perusahaan Inti Rakyat (PIR), mau tidak mau harus berinteraksi dengan sektor tradisional yakni perladangan bergilir (*shifting cultivation*) dengan sifat sub-sisten. Hadirnya perkebunan kelapa sawit mau tidak mau mempengaruhi pola hidup masyarakatnya.

Kehadiran perkebunan berskala besar berdampak pada menyempitnya kawasan hutan. Hal ini berarti ancaman terhadap sumber lahan pertanian yang mencakup kepentingan luas masyarakat setempat. Tulisan ini akan memfokuskan pada masalah bagaimana kemampuan masyarakat melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan ekologis dan mengatur kepentingannya dalam perubahan-perubahan lingkungan yang sifatnya situasional. Sebagai ilustrasi empirik dilakukan pendalaman pada komunitas petani kelapa sawit

yang berbasis pertanian ladang. Kondisi petani sub-sisten yang tiba-tiba dihadapkan pada pertanian modern menjadi landasan empirik untuk mendalami masalah sosial yang timbul dan dihadapi masyarakat lokal.

Dalam pandangan Boeke (1953) sebagaimana diungkapkan oleh Glassburner dan Chandra (1988:168), usaha memodernisasikan Indonesia hanya akan berakhir pada kegagalan. Kemajuan bagi masyarakat Indonesia lebih baik diupayakan dalam aspek sistem ekonomi sosial mereka sendiri daripada membangun masyarakat kota industri yang *sophisticated* dan jauh lebih baik mendorong penyempurnaan masyarakat desa dalam sistem ekonomi yang asli. Pada tahap yang layak dalam proses pembangunannya masyarakat tradisional akan mampu menyesuaikan dirinya sendiri secara alamiah ke arah dorongan perubahan tanpa paksaan atau diperintah.

Setiap usaha pembangunan akan selalu membawa muatan kembar yaitu harapan dan tantangan. Masyarakat yang sedang membangun akan berhadapan dengan harapan dan tantangan tersebut. Ini berarti bahwa, upaya untuk membangun masyarakat pada dasarnya adalah menciptakan beban dan persoalan-persoalan baru untuk dipikul dan diatasi. Memang, upaya tersebut belum tentu dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, apalagi tanpa pengertian dan kesediaan masyarakat untuk ikut berperan. Yang jelas kegagalan adalah keniscayaan apabila bisa skema pembangunan yang disodorkan tidak sejalan dengan tradisi setempat dan tidak tersedia acuan hidup untuk memahami gejala baru. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengkaji dan memahami sistem ekonomi sosial masyarakat yang terjadi akibat adanya pembaharuan pertanian melalui pola Perusahaan Inti Rakyat - Perkebunan (PIR-BUN) kelapa sawit di tengah - tengah peladang tradisional.

1. Karakteristik Perkebunan Kelapa Sawit

Agar bisa memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lokal yang terlibat dalam pembudidayaan kelapa sawit, perlu kiranya kita mencermati karakteristik Perkebunan Kelapa Sawit sebagai suatu upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Karakteristik ini bisa dilacak dari hal-hal yang tetap berlangsung dalam sejarah perkebunan kelapa sawit.

Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia. Bibit kelapa sawit dibawa ke Indonesia pada tahun 1848 dari Afrika Barat. Oleh pemerintah kolonial Belanda, tanaman ini dibudidayakan dalam skala besar sejak tahun 1911. Pemerintah saat itu berambisi untuk mengembangkan lebih lanjut pembudidayaan tanaman ini untuk kepentingan ekspor. Hal ini terlihat dari catatan Sachie Okamoto (1998) dalam kurun waktu 1916-1938 areal perkebunan kelapa sawit meningkat dari 1.271 ha menjadi 93.307 ha.

Kepentingan pemerintah kolonial Belanda adalah membangun kekuatan ekonomi dengan mengelola kelapa sawit sebagai komoditi. Oleh karenanya, sejarah perkebunan di era kolonial Hindia Belanda sebetulnya bukanlah sejarah pengembangan ekonomi masyarakat. Justru sebaliknya, yang tergambar dari narasi sejarah adalah kemiskinan rakyat karena dikenai kewajiban kerja paksa, rodi dan juga perampasan tanah-tanah pertanian untuk. Budidaya perkebunan komoditi memang menembus pasar Eropa namun itu bukan berarti pemberdayaan masyarakat setempat. Selama masa pemerintahan kolonial, orientasinya pengusahaan perkebunan kelapa sawit tidak pernah bergeser dari motif memperoleh pendapatan bagi kas kerajaan Belanda. Petani yang mengerjakannya tidak lebih sebagai kuli tanpa perlindungan hak apapun.

Tradisi membudidayakan kelapa sawit untuk keperluan ekspor terus berlangsung hingga sekarang. Di era pasca pemerintahan kolonial, pengusahaan perkebunan kelapa sawit dilanjutkan sebagai sumber devisa. Yang berganti hanya pemilikannya. Pemilikan berbagai perkebunan komoditi unggulan seperti kelapa sawit, teh, kina, karet berpindah ke tangan pemerintah Indonesia dan pengelolaannya dilakukan oleh sejumlah PTP.

Coraknya sebagai kegiatan ekonomi berskala besar semakin jelas terlihat ketika, pada tahun 1976, berlangsung proses perluasan areal perkebunan yang dibarengi dengan masuknya bantuan keuangan Bank Dunia dan IMF. Pada saat itu diperkenalkan sistem manajemen baru yang diperkenalkan melalui *Nucleus Estates and Smallholders Development Project* (NES). Pembudidayaan perkebunan kelapa sawit tidak lagi hanya mengandalkan pemerintah (dalam hal ini PTP) melainkan juga masyarakat lokal. Sistem manajemen NES kemudian dikenal dengan pola Perkebunan Inti Rakyat yang bermitra dengan perusahaan

atau perkebunan rakyat. Kemitraan ini dipoluerkan dengan istilah PIR-BUN.

Pola PIR-BUN adalah bentuk pengusahaan perkebunan dimana perusahaan bermodal besar dan memiliki sistem manajemen yang mapan diperankan sebagai inti yang fungsinya membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma. Antara inti dan plasma diharapkan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Dalam pola ini sejumlah besar petani disertai peran dalam pengusahaan perkebunan rakyat tersebut. Dengan cara itu diharapkan masyarakat ikut mendapatkan nilai tambah dari kegiatan pembudidayaan tersebut dan pada gilirannya mengalami peningkatan pendapatan. Lebih dari itu, dengan semakin banyaknya petani yang terlibat diharapkan berlangsung pula proses pemerataan pembangunan berlangsung pula apa yang disebut sebagai pengembangan wilayah.

Pengusahaan perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan bisnis yang sangat menguntungkan. Meningkatnya permintaan akan minyak kelapa sawit di pasar internasional telah mendorong terjadinya investasi di sektor perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit terus dilakukan baik oleh perkebunan kelapa sawit milik negara (PTP) maupun oleh perusahaan-perusahaan perkebunan swasta berskala besar. Demikian juga perusahaan-perusahaan perkebunan rakyat berskala kecil melakukan perluasan areal tanaman kelapa sawit. Statistik perkebunan Indonesia mencatat luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 1999 mencapai 3.172.163 ha dengan perincian kepemilikan swasta 1.617.427 ha (51%) perkebunan milik negara 516.447 ha (16%) perkebunan milik rakyat 1.038.289 ha (33%).

Pengembangan perusahaan besar diiringi pengenalan tanaman kelapa sawit yang bernilai komersial ekspor dan penetrasi pemilik modal besar telah mendorong perubahan perekonomian secara nyata berlangsung paralel dengan semakin menguatnya nilai uang seiring berkembangnya diversifikasi usaha pertanian. Perubahan itu pada gilirannya mendorong perubahan-perubahan dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta menguatnya peranan perkebunan rakyat sebagai basis ekonomi yang berdampingan dengan tradisi perladangan.

Dari sudut pandang ekonomi, industri kelapa sawit memberikan pemasukan devisa yang cukup berarti bagi Indonesia. Departemen Pertanian mencatat pada tahun 1997 Indonesia berhasil memasarkan sekitar 5 juta ton minyak kelapa sawit setiap tahun dan menghasilkan devisa sekitar 1,5 Milyar Dolar. Angka ini menempati 30% dari seluruh nilai ekspor komoditi sektor pertanian. Dengan demikian industri kelapa sawit merupakan sub-sektor pertanian yang paling berkembang. Namun demikian dilihat dari segi kemampuan bersaing dalam hal yang sama dengan Malaysia ternyata Indonesia berada di bawahnya. Hal ini karena Malaysia lebih menguasai pasar, kelambatan petani Indonesia dalam peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan kurang produktif serta masih banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan petani plasma.

Skema PIR-BUN didasarkan pada asumsi bahwa kebun inti yang dikelola perusahaan berskala besar berbaik hati dengan menyediakan dan melangsungkan proses pengalih teknologi, selain budidaya tanaman, pengelolaan dan pemasaran. Dengan penggunaan teknologi maju ini diharapkan produktifitas petani lokal bisa meningkat dan pendapatannya juga ikut meningkat. Peran petani lokal sebagai pengelola kebun plasma adalah menyediakan bahan baku buah kelapa sawit yang diolah di pabrik milik kebun inti. Asumsinya, pihak yang kuat akan membantu yang lemah dalam bentuk kerjasama industri perkebunan yang saling menguntungkan.

Penyelenggaraan skema PIR-BUN dibangun diatas asumsi bahwa kondisi ekonomi petani bisa dikembangkan secara kolektif melalui penyediaan faktor-faktor utama produksi dalam usaha tani perkebunan, yaitu: lahan, modal, manajemen, teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Setiap petani peserta (plasma) menerima lahan seluas 3 ha yang terdiri dari lahan tanaman kelapa sawit 2 ha, lahan tanaman pangan 0,75 ha dan lahan pekarangan 0,25 ha termasuk bangunan sebuah rumah ukuran 5x6 meter.

2. Ko-Eksistensi

Diberlakukannya skema PIR-BUN ini berimplikasi pada perombakan pola kepemilikan tanah. Sebagaimana diketahui hak milik atas tanah sebelumnya mendapat legalitas adat. Masuknya skema PIR-BUN

ini menjadikan proses pengusahaan tanah terlepas dari kontrol adat. Skema PIR-BUN, dengan demikian adalah suatu bentuk *agrarian-reform*. Hadirnya perkebunan kelapa sawit dalam skala besar menunjukkan adanya perubahan yang mendasar dalam pola penggunaan tanah (baca: hutan) dan teknik produksi yang oleh Schricke (1955) bahkan disebut revolusi agraria. Sungguhpun demikian, hal itu tidak diikuti dengan transformasi sosial secara besar-besaran.

Meskipun sudah sejak lama masyarakat lokal membuka perkebunan karet rakyat, namun praktik-praktik perladangan secara berpindah-pindah masih tetap berlangsung. Padi sebagai bahan makanan pokok dihasilkan dengan cara berladang dan tanaman karet menjadi sumber uang kontan. Belum dapat dilaporkan, apakah dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit intensitas perladangan menjadi menurun. Yang jelas pihak pemerintah memandang praktik perladangan berpindah mengancam kelestarian hutan dan dapat menghambat program pembangunan daerah. Memang, dalam kurun waktu tertentu, pola perladangan berpotensi membentuk lahan kritis dan marginal. Namun, masyarakat setempat memiliki pemahaman dan ketrampilan ekologis untuk mengatasi persoalan itu. Menurunnya tingkat kesuburan tanah secara bertahap bisa dipulihkan secara alami melalui penghutanan. Kekhawatiran pemerintah bisa dimaklumi mengingat dalam statistik mereka luasan lahan kritis terus saja bertambah. Sekiranya penurunan tingkat kesuburan tanah terjadi, hal ini dijelaskan oleh adanya pencucian yang intensif terhadap lapisan humus oleh tingginya curah hujan durasi musim hujan yang panjang di daerah tropis.

Tanaman kelapa sawit memang belum lama dikenal oleh para peladang. Sungguhpun demikian, secara teknis pembudidayaannya tidak terlalu sulit hanya membutuhkan kecakapan yang tidak terlalu tinggi. Pengusahaan dengan skema padat karya menjadikan perkebunan kelapa sawit dapat menyerap tenaga kerja usia produktif. Namun, mengingat keberadaan sumber daya lahan sangat dilindungi hak ulayat atau adat masyarakat lokal maka pengembangan perkebunan kelapa sawit tidak begitu saja jatuh ke dalam penguasaan para penanam modal.

Dalam budaya tradisi ladang, ikatan emosional masyarakat dan tanah menjadi acuan. Oleh karena itu tidaklah mudah mengalihkan

lapangan kerja mereka ke sektor lain yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai budaya yang mereka hayati sebagai pedoman beradaptasi terhadap lingkungan (Budi Santoso, 1989). Keengganan mereka untuk menyerap introduksi baru dalam pembangunan yang belum menunjukkan kepastian akan memberikan keuntungan disebabkan oleh setiap kegagalan berarti hilangnya sumber kehidupan yang terpenting (Scott, 1989).

Meskipun intensitas penyangga ekonomi pasar semakin meningkat, kebanyakan petani ladang tidak mudah merubah pola pikir subsistensi dalam kegiatan mereka seperti dapat ditunjukkan melalui usaha budidaya perkebunan karet rakyat yang tidak pernah mensejahterakan. Di samping itu mereka masih sangat mengacu pada pengetahuan tradisional (*indigenous knowledge*) yang menguasai pola pikir dalam menghadapi fenomena yang baru. Sungguhpun pengetahuan tradisional mengatur sangat rinci kehidupan sehari-hari, tetapi hanya berlaku sebatas cakupan wilayah komunitasnya. Karena itu sulit berfungsi sebagai pengarah memasuki kondisi lain. Pengusahaan perkebunan kelapa sawit seharusnya memahami hal itu.

3. Format Kemitraan

Kemitraan dengan kalangan pengusaha perkebunan diyakini sebagai mengantarkan kalangan petani pada peningkatan kesejahteraannya. Hal ini diharapkan berlangsung disetiap tahapan yang dirancang.

Pertama: tahap persiapan atau pembangunan. Dalam tahap ini pihak perkebunan inti menyediakan lahan, pembangunan infrastruktur jalan perkebunan, lokasi pemukiman bagi peserta, penentuan calon peserta dan lain-lain. Pada tahap ini calon peserta berperan mensukseskan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit, berkewajiban mengelola pemukiman dan bekerja di kebun. Adapun calon petani plasma memperoleh hak penguasaan rumah tempat tinggal, lahan pangan dan lahan pekarangan. Di samping itu petani plasma mendapat upah perawatan tanaman kelapa sawit. Tahap persiapan berlangsung 3 tahun, dimana selama kurun waktu tersebut tanaman kelapa sawit sudah mulai menghasilkan.

Kedua, tahapan petani menjadi peserta. Tahapan dimulai pada tahun ke 4, dimana para petani plasma bergeser statusnya dari calon peserta menjadi peserta penuh dengan catatan mereka sukses dalam pembudidayaan dan perawatan. Dengan konversi status ini petani plasma memiliki hak sepenuhnya atas kebun, lahan pangan dan pekarangan. Seiring dengan konversi petani plasma memperoleh pendapatan dari hasil kepemilikan kebun kelapa sawit dan tercatat sebagai debitur bank.

Ketiga, tahap pembayaran kembali. Tahapan ini, dimulai pada tahun ke 4 atau ke 5 dimana petani plasma memiliki hak-hak seperti terurai di atas. Mereka berkewajiban mulai membayar angsuran beban kredit yang diterimanya.

Fasilitas lain yang diberikan kepada petani berupa pembinaan dengan cara penyuluhan dan bimbingan teknis tanaman karena keberhasilan usaha perkebunan sangat tergantung pada keberhasilan petani plasma itu sendiri. Pembinaan disesuaikan dengan tujuannya dimulai sejak pengerahan calon peserta menyatakan kesertaannya menjadi petani plasma. Mereka diorganisir dalam kelompok kerja berdasarkan domisilinya yang dibina agar menjadi kelompok tani yang dinamis setelah konversi dilakukan. Setiap petani plasma melakukan pekerjaan menyingkahi rumput liar yang tumbuh di sekitar batang pohon kelapa sawit dan melakukan pemupukan. Pemeliharaan fasilitas jalan di areal perkebunan dilakukan pada setiap kavling agar alat transportasi dapat leluasa keluar masuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen. Pemetikan buah sawit yang lebih di kenal Tandan Buah Segar (TBS) dilakukan ketika buah kelapa sawit telah masak kekuning-kuningan.

Pengawasan dilakukan oleh manajemen perkebunan inti dan sanksi diberikan jika ada petani plasma yang tidak memetik buah kelapa sawit yang sudah masak kendati hanya satu pohon. Petani plasma yang lalai tidak memanen buah sawitnya, dikenakan denda Rp 5000,00. Denda ini dipungut saat menyetorkan buah sawit di tempat proyek. Apabila keluarga petani plasma tidak dapat menyediakan tenaga kerja untuk memanen maka akan mengupah orang lain, tetapi cara ini sulit dilakukan karena terbatasnya tenaga kerja. Cara lain yang dilakukan oleh mereka yang tidak dapat menyediakan tenaga kerja dengan cara mengupah, menempuh cara bagi hasil dengan sesama petani plasma

atau mengundang orang dari luar komunitas petani kelapa sawit. Bagi hasil dilakukan dengan perimbangan 2 bagian untuk pemilik kebun dan 3 bagian menjadi milik penggarap.

Pemasaran buah tandan segar dilakukan langsung oleh petani yang membawanya ke tempat transaksi di pintu pabrik di wilayah proyek. Biaya angkutan ditanggung oleh petani sendiri. Penetapan harga pembelian tandan buah segar didasarkan oleh keadaan kualitas buah yang ditetapkan oleh manajemen perkebunan yang seringkali kurang dipahami oleh petani.

Ketidakpastian dirasakan oleh petani plasma yang mengungkapkan bahwa: pihak aparat pemerintah (PTP) lebih banyak menuntut petani untuk memenuhi kewajibannya, sementara pemerintah tidak memberikan sepenuhnya apa yang seharusnya menjadi hak petani. Bahkan beberapa petani merasa dirugikan dengan penyerahan kebun kelapa sawit yang ditunda-tunda sedangkan mereka telah memenuhi kewajiban menyerahkan tanahnya untuk dikonversi.

Bentuk kerugian lain yang dirasakan petani terjadi pengingkaran manajemen perkebunan inti yang tidak menyerahkan sepenuhnya 3 ha tanah hak petani plasma. Selain itu tanah pekarangan dan lahan untuk tanaman pangan, kualitas kesuburannya sangat rendah karena berupa tanah marginal.

Kerancuan muncul dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan. Untuk kegiatan ini diperlukan sejumlah biaya yang ternyata tidak disediakan oleh manajemen perkebunan inti. Pembiayaan penyuluhan dipandang sebagai kewajiban instansi terkait yaitu Dinas Perkebunan. Kerancuan dalam pembiayaan penyuluhan berakibat pada intensitas pembinaan yang sangat terbatas.

Perbedaan pemahaman atas tanggungjawab dalam pembinaan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa antara aparat PTP dan pejabat pemerintah semuanya dipandang sebagai *penguasa* yang tidak adil. Persepsi ini sudah terbentuk sejak sebelum masyarakat mengenal perkebunan kelapa sawit, yaitu terbentuk dari pengalaman penempatan transmigran di sekitar pemukiman masyarakat lokal. Kecemburuan muncul ketika melihat transmigran sebagai pendatang memperoleh berbagai fasilitas lahan, rumah, bibit tanaman dan jatah kebutuhan hidup.

Kelemahan dalam penyuluhan dan pembinaan terletak pada penyuluh lapangan yang selalu menekankan aspek teknis bercocok tanam tanpa memahami arti pentingnya pendekatan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

4. Pemberdayaan Melalui Kemitraan ?

Bagaimanapun antara petani plasma dan perkebunan inti saling terkait oleh satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tetapi cukup banyak kenyataan yang mengungkapkan bahwa konsep kemitraan diberlakukan secara tidak adil. Beberapa diantaranya dapat dipaparkan.

Sebagian penduduk awalnya menolak rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan pendukung program transmigrasi. Berbagai pendekatan membuahkan kesepakatan mengikutsertakan penduduk setempat menjadi calon petani plasma dengan kewajiban menyerahkan lahan ladangnya. Setiap kelipatan 5 ha, ia akan menerima 3 ha lahan dengan perincian 2 ha kebun sawit, 0,75 ha lahan pangan dan 0,25 ha lahan pekarangan beserta rumah ukuran 5x6 meter.

Sebagian besar petani plasma beranggapan bahwa keterlibatannya dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit ibarat masuk jerat ketika pihak manajemen PTP menetapkan pembagian lahan 3 ha tersebut diperhitungkan sebagai beban kredit bank yang harus dibayar oleh petani plasma. Petani plasma merasa tertipu mengingat mereka telah menyerahkan lahan pertaniannya seluas 5 ha untuk perkebunan kelapa sawit tanpa ganti rugi. Pihak PTP tetap berpegang pada petunjuk pelaksanaan proyek, bahwa tanah seluas 3 ha yang diserahkan kepada petani plasma berikut bangunan rumah merupakan paket dari pemerintah yang harus dibayar petani. Akibat dari kerancuan ini petani plasma tidak bersedia terikat pada akad kredit dan yang kemudian terjadi pelaksanaan konversi menjadi terhambat.

Lahan tanaman pangan yang diterima petani plasma merupakan lahan kritis yang tidak subur berupa padang ilalang. Oleh karena itu petani tidak mengolahnya dan diterlantarkan tanpa perawatan. Dalam konsep pengetahuan pertanian tradisional masyarakat lokal tidak pernah mengusahakan tanah-tanah kritis menjadi lahan pertanian.

Tipologi tanah seperti ini dengan kearifan pengetahuan lokal akan dibiarkan berproses menjadi semak belukar sampai menjadi hutan sekunder dan kemudian dibuka menjadi lahan yang subur untuk ditanami.

Keengganan petani plasma mengolah pembagian lahan pangan yang tidak subur disebabkan mereka umumnya masih memiliki tanah-tanah pertanian (hutan) yang subur selaras dengan tradisi perladangan. Di samping memiliki lahan cadangan untuk ladang, mereka mempunyai kebun karet yang menjamin perolehan uang kontan.

Keragu-raguan masyarakat setempat terhadap masa depan yang lebih baik dengan menjadi peserta petani plasma mengakibatkan sejumlah petani plasma menjual kavling kebun kelapa sawitnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PTP. Akibatnya gejala konsentrasi kepemilikan kebun pada orang-orang tertentu mulai terjadi.

Penduduk lokal tidak memiliki akses yang leluasa untuk menjadi karyawan PTP yang mengelola perkebunan. Mereka memprotes mengapa yang menjadi karyawan sebagian besar orang-orang dari luar daerah. Dalam pandangan mereka perkebunan kelapa sawit hanya menguntungkan sejumlah kecil orang dari luar sedangkan masyarakat lokal dituntut bekerja keras tetapi tetap saja miskin.

Pandangan negatif masyarakat ditujukan pula kepada manajer perkebunan di mana dalam membuat kebijakan yang mengangku kepentingan masyarakat tidak pernah melibatkan pemuka adat yang menjadi panutan penduduk. Penyelesaian masalah yang menyangkut pihak perkebunan inti dan petani plasma tidak diselesaikan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan sosial melainkan dengan cara memanggil petani plasma ke kantor PTP. Tindakan seperti ini dipahami sebagai hubungan penguasa dan hamba. Ironinya pihak manajemen perkebunan inti melibatkan aparat desa ketika suatu permasalahan tidak terselesaikan oleh pihak PTP.

Sebagai karyawan PTP jelas mereka menerapkan pola hidup yang berbeda dengan penduduk setempat. Mereka menikmati fasilitas perkebunan yang kondisinya baik, seperti: perumahan, kendaraan dan listrik. Semua ini mempertegas adanya jarak sosial antara petani plasma dan karyawan perkebunan. Bagi petani plasma, memiliki kelengkapan hidup secara fisik yang lebih berkualitas masih sebatas angan-angan.

Pola PIR-BUN kelapa sawit dikembangkan di wilayah pemukiman masyarakat yang dalam kurun waktu panjang mempraktikkan tradisi pertanian ladang berpindah (*shifting cultivation*). Tujuannya sangat manusiawi yaitu untuk meningkatkan ekonomi setempat dengan pengaturan tata ruang yang mencakup wilayah usaha tani, pemukiman dengan kelengkapan sarana serta dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Pada dasarnya pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit merupakan upaya untuk meningkatkan produksi komoditas yang berkualitas dan memiliki daya saing terutama pada serapan pasar. Dengan demikian komunitas pertanian harus mampu memenuhi permintaan pasar, mengutamakan produk unggulan yang mampu bersaing untuk memenuhi fungsi ekonomi dan sosial.

Mengembangkan komoditi perkebunan kelapa sawit sesuai dengan potensi wilayah setempat menghadapi tantangan sumber daya manusia petani yang kurang memiliki kemampuan untuk melihat potensi diri dan upaya pengembangannya. Ketidakberdayaan petani setempat pada umumnya pada kemampuan yang rendah dalam pengadaan sarana produksi, pemasaran hasil, rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis usaha tani. Di samping itu seringkali usah tani dihadapkan pada regulasi-regulasi yang tidak menguntungkan petani seperti penetapan harga secara sepihak dari pihak eksternal. Dengan demikian pengembangan perkebunan kelapa sawit perlu terprogram dan terarah. Dalam kaitan ini satu hal yang perlu mendapat perhatian bahwa dalam proses pengembangannya itu unsur manusiawi di samping mempunyai kedudukan sebagai subyek yang menggerakkan dan mengarahkan jalannya pembangunan sekaligus juga sebagai obyek kepada siapa gerakan dan jalannya pembangunan itu ditujukan.

Tidak disangkal keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar sebagai bentuk eksploitasi yang didukung ekspansi modal mengancam secara otomatis terhadap sumber daya hutan. Berbagai undang-undang konversi ditetapkan guna menata bentuk-bentuk aktivitas terhadap hutan. Meskipun demikian praktik-praktik perladangan berpindah yang secara teknologi berkaitan dengan pemanfaatan hutan masih tetap potensial dalam penyelenggaraan sistem perekonomian masyarakat lokal. Ekstensifikasi menjadi ciri khas apabila di suatu kawasan kurang memungkinkan lagi menghasilkan padi maka

dalam waktu tertentu kawasan itu ditinggalkan dan bersamaan dengan itu dibuka lahan perladangan baru dengan cara membuka hutan sekunder. Dalam hal ini lahan yang ditinggalkan menjadi tanah kritis dan melalui evolusi yang panjang kembali berciri hutan.

Hadirnya PIR-BUN kelapa sawit telah memberi ciri berlangsungnya perubahan sistem ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Berkaitan dengan pelaku dan sistem sosial yang melekat pada usaha perkebunan kelapa sawit perlu dipahami hubungannya secara struktural dengan masyarakat di luar komunitas mereka yang lebih luas. Tanaman kelapa sawit adalah komoditi komersial yang nilai ekonominya relatif prospektif. Kenyataan ini dapat dijelaskan bahwa pemilik modal yang menanamkan investasinya tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari negara lain. Usaha PIR-BUN secara nyata telah mendorong berkembangnya diversifikasi usaha dan semakin intensifnya penggunaan uang. Kesemuanya turut mendorong perubahan-perubahan dalam penggunaan dan penguasaan tanah karena komersialisasi dan monetisasi. Di sisi lain peranan ekonomi perkebunan rakyat yang berakar pada pertanian ladang cenderung mendorong perubahan ekologi mengikuti pengembangan perusahaan perkebunan besar.

Dinamika sosial ekonomi masyarakat lokal setidaknya tercermin pada pengaturan ekonomi rumah tangga. Penghasilan yang tersisa dari pendapatan sebagai petani plasma ditabung dalam bentuk *simpedes* dan dalam simpanan sukarela koperasi di desanya. Aspek pendidikan formal anak-anak petani plasma mendapat perhatian yang lebih baik bahkan tidak sedikit yang berhasil menikmati pendidikan di perguruan tinggi. Adalah pemandangan yang hampir merata di setiap keluarga memiliki barang-barang elektronik terutama yang bersifat hiburan. Komersialisasi, monetisasi dan nilai kapitalis semakin intensif menjamah nilai-nilai sosial dan ekonomi penduduk lokal.

Namun demikian, memahami perubahan sosial, ekonomi dan ekologi masyarakat lokal akan keliru jika mengabaikan faktor-faktor internal yang mendahuluinya. Ketika sumber daya alam belum banyak menjalani eksploitasi besar-besaran yaitu sebelum munculnya PIR-BUN, masyarakat peladang merasakan hidup yang menyenangkan. Mereka selain memiliki ruang gerak yang leluasa untuk berladang, mereka dapat dengan mudah memperoleh penghasilan tambahan dari hasil hutan seperti menjual papan kayu, madu, karet, buah tengkawang.

Mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam tidak lebih dari sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Berkembangnya usaha PIR-BUN bukannya tanpa masalah karena masyarakat harus membayar ongkos sosial yang tidak sedikit. Konsep kemitraan diterapkan dalam posisi yang tidak seimbang di mana petani merupakan sub-ordinasi dan hubungan kemitraan lebih bersifat hubungan *patron-client*.

Perbedaan pandangan diakibatkan oleh komunikasi yang tidak dapat dipahami oleh petani plasma sejak menjadi calon peserta pada tahap persiapan mengapa petani harus menyerahkan lahannya kepada manajemen perkebunan. Terlebih lagi ketika petani harus membayar tanah seluas 3 ha yang berasal dari tanah petani sendiri ?

Konversi kebun kelapa sawit kepada petani yang ditunda-tunda menambah panjang masa tunggu petani untuk memiliki kebun dan selama itu status mereka adalah buruh perkebunan yang hidup dari upah harian.

5. Penutup

Berlangsungnya kebun kelapa sawit berskala besar berawal dari perburuan devisa yang disemangati oleh kebijakan pemerintah dan kemudian difasilitasi penetrasi kapitalis melalui penanaman modalnya. Munculnya diversifikasi sumber ekonomi semakin menguatkan peredaran uang pada komunitas lokal melalui usaha perkebunan rakyat yang berorientasi pasar. Proses transformasi yang bercorak seperti ini sama sekali tidak menjamin perbaikan nasib petani kelapa sawit. Lagi pula pembudidayaan kelapa sawit dalam skala besar memiliki dampak ekologis yang penting untuk dicermati dan diminimalisir.

Upaya pengembangan sosial melalui unit-unit sosial dalam program peningkatan kesejahteraan komunitas lokal tentu saja harus dilakukan terlepas dari masih adanya stigma bahwa masyarakat tradisional enggan berubah. Mengingat rumitnya perubahan-perubahan yang harus dikelola, keberpihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat dan kesungguhan penerapan kebijakan tersebut adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar.

Perlu dicatat bahwa pemrosesan buah kelapa sawit menjadi hasil akhir berupa minyak sawit hanya dapat dilakukan sepenuhnya oleh pabrik. Ini berarti bahwa petani sebetulnya tidak memiliki fasilitas dan tidak mempunyai teknologinya sehingga nasib petani kelapa sawit sepenuhnya tergantung pada pabrik. Manipulasi dalam bentuk apapun dapat dilakukan di luar pengawasan petani dan jika itu terjadi maka akan menambah panjang deretan pengorbanan petani.

Daftar Pustaka

- Fukuyama, Francis, (1999). *The Great Disruption, Human Nature and The Reconstruction of Social Order*. New York: The Free Press.
- Glassburnen, Bruce dan Aditiawan Chandra, (1988). *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*. Jakarta: LP3ES.
- Loekman Soetrisno dan Retno Winahyu, (1991). *Kelapa Sawit, Kajian Sosial -Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mudiyono, (1990). *Perubahan Sosial - Budaya dan Ekologi Peladang*. FISIPOL - UNTAN
- Okamoto, Sachie, (1998). *The Growth of Oil Palm Plantation and Forest Destruction in Indonesia*. Bangkok.
- Sapardi, (1992). *Pengaruh Proyek Perubahan Inti Rakyat Perkebunan Terhadap Ekonomi Rumah Tangga*, Tesis Pascasarjana, UI.
- Schrieke, B, (1995). *Causes and Effects Communism on The West Coast of Sumatra*, Indonesian Social Studies, Den Haag.
- Scott, J.C, (1976). *The Moral Economy of Peasant, Rebellion and Subsistence in South East Asia*. New Haven: Yale University.